

KERANGKA ACUAN KERJA
PENEGAKKAN DISIPLIN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN
TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum :

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Perbendaharaan Negara;
- d. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Bahwa selain dilaksanakan pembinaan dan penegakkan disiplin PNS, Pemerintah perlu memberikan penghargaan dan perlindungan sebagai bagian dari *reward and punishment*. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, melalui Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemberian penghargaan dan perlindungan bagi PNS, yang meliputi:

- a. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas, dengan merubah cara pikir PNS aktif layaknya pensiunan dengan menata lagi

keuangan, mengelola modal seperti pengalaman, tabungan, jejaring dan waktu menjadi satu aktivitas positif yang akan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental dan keuangan serta menjadikan pensiunan yang mandiri.

- b. Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BKD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ke Sekretariat Militer Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
- c. Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di samping sebagai penghargaan atas jasa-jasanya juga merupakan kebanggaan untuk lebih meningkatkan semangat kerja, motivasi kerja, meningkatkan kinerja dan disiplin. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembangunan manajemen kepegawaian guna mewujudkan aparatur yang bersih, loyal dan berintegritas tinggi.
- d. Penanganan Jaminan Kecelakaan dan Uji Kesehatan. Pemberian perlindungan bagi PNS dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai PNS. Selain itu dilaksanakan uji kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan kesehatan serta sebagai salah satu persyaratan untuk perpanjangan cuti sakit.
- e. Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender. Dalam rangka membangun karakter PNS untuk dapat mengembangkan kapasitas dirinya dan mengaktualisasikan perannya sebagai mitra dalam pembangunan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Sebagai bentuk penegakkan disiplin bagi PNS dan memberikan penghargaan dan perlindungan PNS dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Sebagai bentuk *reward* kepada PNS yang telah bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Tujuan

Tercapainya realisasi kegiatan penegakkan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah :

1. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas
Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dengan pemberian materi berupa materi pengetahuan secara teori dan praktik serta kunjungan lapangan, dengan jumlah peserta 25 orang dalam 2 kali kegiatan/Angkatan. Pasca pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta untuk mengevaluasi, memotivasi dan mendata peserta.
2. Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Penyampaian dokumen kelengkapan PNS yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
3. Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan pemberian piagam dan SK Presiden tersebut melalui rangkaian penyematan pada acara kenegaraan, yaitu upacara.
4. Penanganan Jaminan Kecelakaan dan Uji Kesehatan
Penyampaian usul dokumen kelengkapan PNS yang mengalami kecelakaan kerja atau mengalami gangguan kesehatan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya.
5. Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender.
Pelaksanaan kegiatan Bintek Kaderisasi PNS berbasis gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah peserta 50 (lima Puluh) orang yang telah dinyatakan lulus *talent scouting*.

D. SASARAN :

1. Jumlah yang mendapatkan pembekalan PNS yang memasuki masa purna tugas 50 orang.
2. Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sejumlah 200 orang.
3. Jumlah usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah sejumlah 2000 dokumen.
4. Jumlah penanganan usulan Jaminan Kecelakaan Kerja sejumlah 2 dokumen.
5. Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender sejumlah 50 orang.

E. LOKASI KEGIATAN :

Kegiatan penegakkan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan PNS dilaksanakan di dalam daerah lingkup Provinsi Jawa Tengah dan di Jakarta pada Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Militer Presiden.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan	Bulan :											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas						■		■				
Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	■				■							
Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya					■			■			■	
Penanganan Jaminan Kecelakaan dan Uji Kesehatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender							■					

G. KELUARAN

1. Terlaksananya pembekalan PNS yang memasuki masa purna tugas sejumlah 50 orang.
2. Terlaksananya PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sejumlah 200 orang.
3. Terlaksananya usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah sejumlah 2000 dokumen.
4. Terlaksananya penanganan usulan Jaminan Kecelakaan Kerja sejumlah 2 dokumen.
5. Terlaksananya Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender sejumlah 50 orang.

6. ANGGARAN

Biaya kegiatan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp 482.000.000,- (Empat Ratus Juta Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

7. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan penegakkan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan PNS diharapkan akan dapat memberi kebanggaan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil, menumbuhkan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai serta memberikan perlindungan bekerja.

Semarang, Januari 2021

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690513 198903 1 005